

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM AKREDITASI TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SDN 68/I SIMPANG MERSAM

Shinta Nuriah Hafifah¹, Roidatun Nisa², Rizki Nasrulloh³, Neyla Syifa Ulvia⁴, Dini Aulya⁵, Anjly Nur Hasanah⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Universitas Islam Batang Hari, Jambi, Indonesia

Correspondent Email : shintaazhari1906@gmail.com

ABSTRACT. This study aims to evaluate the effectiveness of the accreditation system in improving education quality at SD Negeri 68/I Simpang Mersam, identifying inhibiting factors and mitigation strategies. Using a qualitative approach with a phenomenological design, data were gathered through semi-structured interviews, observations, and documentation involving the principal, teachers, and staff. Data analysis followed the interactive model: data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the online accreditation process, achieving a "B" grade, effectively enhances administrative discipline, school governance, and learning effectiveness. However, optimizing this external quality assurance is hindered by internet instability during virtual visitations, limited infrastructure, and a deficit of two classrooms. The school mitigates these challenges through specific job descriptions, bandwidth upgrades, space optimization, and facility funding proposals. This study concludes that accreditation serves as a strategic self-assessment tool to foster a sustainable quality culture.

Keywords: Education Quality, Primary Education, School Accreditation, School Governance.

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 68/I Simpang Mersam, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi penanggulangannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan. Analisis data dilakukan melalui tahap kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akreditasi daring yang menghasilkan predikat Akreditasi B berjalan efektif dalam meningkatkan disiplin administrasi, tata kelola manajemen, dan efektivitas pembelajaran. Namun, optimalisasi penjaminan mutu eksternal ini masih terhambat oleh ketidakstabilan jaringan internet saat visitasi virtual, keterbatasan sarana prasarana, serta defisit dua ruang kelas baru. Pihak sekolah memitigasi kendala tersebut melalui pembagian deskripsi kerja yang spesifik, peningkatan kapasitas bandwidth, efisiensi tata ruang, serta pengajuan bantuan fasilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akreditasi berfungsi sebagai instrumen evaluasi mandiri yang strategis untuk menumbuhkan budaya mutu berkelanjutan.

Kata Kunci: Akreditasi Sekolah, Manajemen Sekolah, Mutu Pendidikan, Pendidikan Dasar.

Article History

Submission : 06/21/2026 Revision: 06/29/2026 Accepted: 07/01/2026 Published: 07/14/2026

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya, di mana kapasitas SDM tersebut menjadi modal utama dalam menggerakkan pembangunan nasional. Konteks kualitas SDM ini menempatkan pendidikan sebagai pilar yang sangat esensial dalam proses humanisasi pada masyarakat yang berbudaya, sekaligus menjadi benteng utama dalam menghadapi disrupsi globalisasi yang masif di segala aspek kehidupan (Afriyadi & Tilaar, 2021). Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha universal dan historis yang melekat pada eksistensi manusia guna melestarikan serta meningkatkan mutu kehidupannya (Saputra & Lestari, 2022). Sejalan

dengan prinsip filosofis tersebut, nilai-nilai transendental juga menegaskan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan sebagai sarana elevasi derajat kemanusiaan, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 yang mengamanatkan urgensi memberikan kelapangan dalam majelis ilmu serta menjanjikan derajat yang tinggi bagi individu yang beriman dan berilmu.

Dalam kerangka yuridis formal di Indonesia, pendidikan diakui sebagai hak fundamental setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Landasan konstitusional ini tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 serta dijabarkan operasionalisasinya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Melalui payung hukum tersebut, orientasi pendidikan nasional digeser agar tidak sekadar menjadi media transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan bertransformasi sebagai instrumen strategis dalam pembentukan karakter, kecerdasan, dan keterampilan aplikatif (Fitriah & Mulyadi, 2020). Oleh karena itu, salah satu fokus krusial yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan adalah mutu pendidikan, yaitu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang dinilai dari kemampuan lembaga dalam memenuhi standar penjaminan mutu yang komprehensif (Sarvitri et al., 2022).

Upaya peningkatan mutu pendidikan bukanlah suatu variabel tunggal, melainkan sebuah proses integratif yang memerlukan sinergi dari berbagai komponen institusional. Fadhli (2020) mengemukakan bahwa mutu pendidikan dipengaruhi secara simultan oleh kebijakan pemerintah, kepemimpinan kepala sekolah, relevansi kurikulum, kinerja guru, serta iklim organisasi sekolah yang kondusif. Sebagai langkah strategis untuk mengukur dan menjamin pemenuhan indikator-indikator tersebut secara objektif, pemerintah menerapkan sistem akreditasi sekolah. Akreditasi merupakan proses penilaian kelayakan satuan pendidikan secara komprehensif berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu eksternal sekaligus pendorong perbaikan kinerja lembaga secara berkelanjutan (Febrianti & Syukri, 2023). Melalui akreditasi, sekolah didorong untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internalnya guna membangun akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lulusan yang dihasilkan.

Meskipun sistem penjaminan mutu telah dirancang secara sistematis, realisasi pemenuhan standar mutu di tingkat pendidikan dasar masih menghadapi berbagai kendala empiris yang kompleks. Penelitian Arismunandar dan Mus (2025) menyingkap fenomena bahwa banyak sekolah dasar yang mendapatkan peringkat akreditasi rendah akibat kendala administratif dan substantif, seperti rendahnya kompetensi pedagogis guru, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan (mismatch), serta lemahnya implementasi manajemen sekolah. Banyak lembaga pendidikan yang terjebak pada pemenuhan aspek dokumenter formalitas semata demi kelulusan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP 2020), tanpa diimbangi oleh internalisasi budaya mutu dalam operasional harian sekolah (Kusnandar & Handayani, 2024). Kondisi dilematis ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara regulasi akreditasi di atas kertas dengan dinamika implementasi riil di lapangan.

Kondisi empiris tersebut juga terpotret berdasarkan hasil grand tour awal yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 68/I Simpang Mersam. Meskipun sekolah ini secara formal telah mengikuti proses akreditasi dan berupaya melakukan pembenahan manajemen serta penguatan kompetensi tenaga pendidik, namun dalam praktiknya dinamika peningkatan mutu tersebut masih fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai kendala operasional. Atas dasar urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas sistem akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 68/I Simpang Mersam, dengan fokus masalah pada penerapan sistem akreditasi, faktor-faktor penghambat pelaksanaan, serta upaya strategis yang ditempuh pihak sekolah untuk mengatasi hambatan tersebut. Secara teoritis, studi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan manajemen pendidikan dasar, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan evaluasi kritis bagi kepala sekolah dan pemangku kebijakan dalam menumbuhkan budaya mutu pendidikan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi guna memahami secara mendalam efektivitas sistem akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 68/I Simpang Mersam. Pendekatan fenomenologi dipilih karena berorientasi pada eksplorasi dan pemaknaan atas pengalaman hidup (lived experiences) para aktor di lapangan secara utuh dan terperinci (Roosinda et al., 2021). Situasi sosial penelitian mencakup tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berlangsung di

lingkungan sekolah tersebut. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria pengalaman dan otoritas kompetensi yang relevan terhadap fokus kajian, yang meliputi Kepala Sekolah, perwakilan guru, serta tenaga kependidikan (Sugiyono, 2020). Desain riset ini dirancang secara sistematis untuk memotret realitas kontemporer penjaminan mutu satuan pendidikan dasar pada periode pelaksanaan bulan Juni hingga November 2026.

Jenis data yang dihimpun dalam studi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber langsung dari hasil interaksi orisinal peneliti dengan informan kunci melalui wawancara semi-terstruktur serta observasi langsung terhadap kondisi fisik sekolah, proses manajemen kelas, dan pemenuhan sarana prasarana kependidikan (Murdiyanto, 2020). Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui teknik dokumentasi atas dokumen-dokumen internal institusi, seperti visi-misi sekolah, profil lembaga, instrumen evaluasi diri sekolah (EDS), serta berkas laporan capaian Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP 2020). Guna menjamin keabsahan dan derajat kepercayaan (credibility) dari data yang telah dikumpulkan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber. Proses ini dilaksanakan dengan membandingkan secara kritis kesesuaian data hasil observasi lapangan dengan pernyataan verbal informan pada saat wawancara mendalam, serta mencocokkannya kembali dengan fakta-fakta administratif yang tercatat dalam dokumen resmi sekolah (Rukin, 2021).

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model interaktif kontemporer yang diadaptasi dari konsep Miles et al. (2020), yang mengalir melalui tiga tahapan simultan pasca-pengumpulan data (data collection). Tahap pertama adalah kondensasi data (data condensation), di mana peneliti melakukan reduksi, pemilahan, dan penyederhanaan terhadap transkrip wawancara serta catatan lapangan agar terfokus pada indikator efektivitas akreditasi dan mutu pembelajaran. Tahap kedua adalah penyajian data (data display), yakni mengorganisasikan informasi yang telah tereduksi ke dalam bentuk teks naratif yang terstruktur, logis, dan mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verifying), di mana peneliti menginterpretasikan makna dari pola-pola hubungan yang ditemukan di lapangan untuk menjawab rumusan masalah secara kredibel, objektif, dan akurat mengenai potret tata kelola manajemen pendidikan dasar (Moleong, 2021).

HASIL

Penerapan sistem akreditasi di SD Negeri 68/ Simpang Mersam saat ini telah terealisasi dengan pencapaian predikat Akreditasi B. Secara umum, satuan pendidikan ini telah dilengkapi dengan komponen sarana dan prasarana penunjang berupa ruang kelas, mushola, ruang serbaguna, laboratorium, dan ruang perpustakaan. Proses visitasi dan penilaian kelayakan instrumen akreditasi dilaksanakan sepenuhnya secara daring (online), di mana seluruh rangkaian tahapan dikelola melalui sistem digital. Rangkaian tahapan terstruktur tersebut diawali dari pembentukan tim kerja akreditasi internal, pelaksanaan sosialisasi instrumen, inventarisasi berkas administratif, pemenuhan unggahan dokumen pada sistem, proses verifikasi, tahapan wawancara virtual bersama tim asesor, hingga fase peninjauan rekomendasi akhir untuk perbaikan mutu tata kelola lembaga secara berkelanjutan.

Keterlibatan kolektif seluruh warga sekolah menjadi fondasi utama dalam keberhasilan pemenuhan indikator akreditasi daring ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Bapak Sulaiman, S.Pd., diketahui bahwa institusi membagi habis tanggung jawab pemenuhan standar kependidikan kepada para guru dan tenaga kependidikan melalui koordinasi intensif agar target ketercapaian mutu sarana serta administrasi terpenuhi. Dampak positif pengorganisasian ini dikonfirmasi oleh Ibu Asnidar, S.Pd., selaku guru kelas, yang merasakan adanya peningkatan disiplin kerja dan kerapian dokumen perangkat pembelajaran. Lebih lanjut, Bapak Andi Aprizal, S.Pd., sebagai Tim Penyelenggara Akreditasi, menegaskan bahwa data capaian IASP yang diunggah ke sistem online tidak sekadar ditujukan untuk pemenuhan formalitas nilai, melainkan diposisikan sebagai basis data evaluasi mandiri guna memperbaiki mutu kelulusan dan kompetensi pendidik secara objektif.

Di balik capaian tersebut, hasil investigasi lapangan mengidentifikasi keberadaan tiga faktor penghambat utama yang membatasi optimalisasi proses akreditasi dan pemenuhan mutu. Faktor hambatan pertama dan yang paling krusial adalah ketidakstabilan kualitas jaringan internet di area sekolah, yang diakui oleh kepala sekolah dan guru cukup mengganggu kelancaran komunikasi audiovisual saat sesi wawancara daring dengan asesor serta memperlambat proses pengunggahan dokumen digital yang berukuran besar. Faktor kedua adalah belum optimalnya pemenuhan standar sarana prasarana penunjang secara umum demi kepuasan pelanggan pendidikan. Faktor ketiga yang bersifat spesifik dan mendesak adalah

adanya defisit ruang belajar, di mana sekolah secara nyata masih mengalami kekurangan minimal dua ruang kelas baru guna menampung rombongan belajar secara ideal.

Sebagai langkah solutif, pihak manajemen SD Negeri 68/I Simpang Mersam mengimplementasikan beberapa strategi taktis terencana untuk mengeliminasi kendala tersebut. Untuk meminimalkan hambatan administratif, kepala sekolah memperkuat fungsi manajemen melalui pembagian deskripsi kerja (job description) yang spesifik bagi setiap guru dalam pemenuhan portofolio akreditasi sehingga beban kerja terdistribusi secara adil. Terkait hambatan teknis dan infrastruktur, pihak sekolah melakukan mitigasi dengan meningkatkan kapasitas penyediaan bandwidth internet secara mandiri pada hari visitasi daring guna menjamin kelancaran komunikasi dengan asesor. Sementara untuk mengatasi keterbatasan ruang belajar, sekolah memaksimalkan tata guna lahan dan ruang multiguna yang ada secara fleksibel sembari secara aktif mengajukan usulan bantuan peminjaman atau pembangunan ruang kelas baru kepada pemangku kebijakan terkait.

PEMBAHASAN

Dinamika implementasi sistem akreditasi di SD Negeri 68/I Simpang Mersam menunjukkan bahwa perubahan paradigma evaluasi eksternal berbasis digital menuntut kesiapan manajemen sekolah yang bersifat responsif. Keberhasilan sekolah dalam meraih predikat Akreditasi B melalui sepuluh tahapan sistematis mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi administrasi dasar, mulai dari perencanaan (planning) hingga pengawasan (controlling). Pola pelibatan guru secara menyeluruh dalam penyusunan dokumen portofolio membuktikan bahwa akreditasi efektif bertindak sebagai stimulus penegakan kedisiplinan administratif. Hal ini sejalan dengan konsep penjaminan mutu modern yang menempatkan evaluasi eksternal bukan sebagai beban birokrasi, melainkan sebagai cermin reflektif untuk melihat disparitas antara standar regulasi dengan realitas empiris di tingkat kelas.

Dampak positif akreditasi terhadap peningkatan motivasi kerja pendidik dan penataan sarana prasarana mengonfirmasi bahwa instrumen penilaian kelayakan mampu menggerakkan kesadaran mutu internal (internal quality culture). Ketika guru terlibat aktif dalam merevisi perangkat pembelajaran mereka selama proses akreditasi, terjadi proses refleksi pedagogis secara tidak langsung yang meningkatkan kualitas transfer pengetahuan kepada peserta didik. Suasana interaktif yang tercipta selama persiapan dokumen juga mempererat iklim kolaborasi profesional antar-guru. Rekomendasi yang diterbitkan oleh badan akreditasi pasca-visitasi

kemudian berfungsi sebagai cetak biru (blueprint) strategis bagi manajemen sekolah dalam mengalokasikan anggaran prioritas untuk perbaikan fasilitas penunjang seperti perpustakaan dan laboratorium.

Namun demikian, munculnya kendala teknis berupa ketidakstabilan jaringan internet pada model visitasi daring menggarisbawahi adanya tantangan struktural yang kerap dihadapi oleh sekolah di daerah. Ketergantungan yang tinggi pada platform digital dalam sistem akreditasi kontemporer mensyaratkan kesiapan infrastruktur telekomunikasi yang merata. Ketika aspek teknis seperti bandwidth mengalami gangguan, hal tersebut berpotensi mendistorsi objektivitas penilaian karena proses klarifikasi indikator antara guru dan asesor menjadi terhambat. Selain itu, masalah kekurangan dua ruang kelas menegaskan adanya gap yang nyata antara tuntutan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan kemampuan finansial mandiri sekolah, yang mana pemenuhannya tidak dapat diselesaikan hanya lewat kreativitas internal melainkan membutuhkan intervensi anggaran dari pemerintah.

Oleh karena itu, strategi optimalisasi yang ditempuh oleh kepala sekolah melalui penguatan manajemen koordinasi terstruktur dan efisiensi tata ruang merupakan langkah adaptasi yang tepat dalam keterbatasan (coping strategy). Pembagian tugas yang jelas terbukti mampu menekan kecemasan organisasional menghadapi akreditasi sehingga dokumen dapat diselesaikan sesuai target waktu. Keberanian sekolah melakukan peningkatan fasilitas internet secara mandiri serta pengajuan usulan ruang kelas baru menunjukkan komitmen untuk bergeser dari sekadar pemenuhan administratif (compliance) menuju perbaikan mutu yang berkelanjutan (continuous quality improvement). Secara keseluruhan, efektivitas sistem akreditasi di sekolah ini berhasil menstimulus lahirnya tata kelola lembaga yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak belajar siswa secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akreditasi di sd negeri 68/I Simpang Mersam telah berjalan dengan efektif melalui kejelasan tujuan, strategi pelaksanaan yang sistematis, dan pembagian tugas terstruktur antara Kepala Sekolah, guru, serta Tim Akreditasi. Rangkaian visitasi yang dilaksanakan secara daring terbukti mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, terutama pada dimensi tata kelola manajemen sekolah, kedisiplinan administrasi kependidikan, efektivitas proses pembelajaran, serta stimulus pembenahan fasilitas. Namun demikian,

optimalisasi penjaminan mutu eksternal ini masih terhambat oleh faktor-faktor struktural dan teknis di lapangan, yang meliputi ketidakstabilan kualitas jaringan internet saat visitasi virtual, keterbatasan sarana prasarana sekolah secara umum, serta adanya defisit ruang belajar yang menuntut penambahan minimal dua ruang kelas baru.

Implikasi teoretis dan praktis dari penelitian ini menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar instrumen penilaian administratif formalitas, melainkan berfungsi sebagai kompas evaluasi mandiri (self-assessment) untuk memetakan kekuatan serta kelemahan internal sekolah secara objektif. Keberhasilan dalam meraih predikat mutu sangat bergantung pada penguatan iklim kolaborasi profesional dan komitmen regulasi diri (self-regulation) seluruh warga sekolah. Di samping itu, temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar sarana dan prasarana yang layak merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, serta berorientasi pada pemenuhan hak-hak pedagogis peserta didik di era digital.

Sebagai rekomendasi dan saran tindak lanjut, Kepala Sekolah bersama Tim Akreditasi diharapkan dapat mempertahankan konsistensi budaya mutu ini dengan mengintegrasikan rekomendasi hasil akreditasi ke dalam rencana strategis anggaran sekolah secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan manajemen dokumen berbasis digital. Bagi para guru, disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi profesional dan kedisiplinan perangkat pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pemerintah dan dinas pendidikan terkait disarankan untuk memberikan intervensi kebijakan yang konkret melalui alokasi bantuan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perluasan gedung ruang kelas baru. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lokus kajian dengan cakupan multisekolah maupun metode campuran (mixed-methods) guna memperoleh generalisasi data yang lebih komprehensif terkait efektivitas akreditasi pada jenjang pendidikan dasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan material maupun moral dalam penyelesaian artikel penelitian ini. Ungkapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Bapak Muammar Qadafi, S.Pd.I., M.Pd. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Batanghari, atas segala arahan, evaluasi, dan ilmu yang telah

diberikan. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Pendidikan Islam Universitas Islam Batang Hari atas fasilitas akademik yang disediakan. Selain itu, ucapan terima kasih yang mendalam ditujukan kepada Bapak Sulaiman, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 068/I Simpang Mersam, yang telah memberikan izin penelitian, serta kepada Bapak Andi Aprizal, S.Pd. selaku Tim Penyelenggara Akreditasi, Ibu Asnidar, S.Pd., Ibu Herlina selaku operator sekolah, beserta seluruh majelis guru dan tenaga kependidikan atas sikap kooperatif dan informasi berharga yang diberikan selama proses pengumpulan data. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada keluarga atas dukungan doa dan motivasi, serta berharap hasil penelitian mengenai efektivitas sistem akreditasi di SD Negeri 68/I Simpang Mersam ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu manajemen pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyadi, H., & Tilaar, H. A. R. (2021). Pengembangan sumber daya manusia berbasis mutu pendidikan di era disrupsi global. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 88–98.

Arismunandar, A., & Mus, S. (2025). Problematika pemenuhan standar nasional pendidikan dalam instrumen akreditasi satuan pendidikan (IASP 2020) di sekolah dasar. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 13(1), 45–59.

Fadhli, M. (2020). Manajemen peningkatan mutu pendidikan. *Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 215–230.

Febrianti, R., & Syukri, A. (2023). Peran akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu eksternal pada satuan pendidikan dasar. *Jurnal Evaluasi dan Kebijakan Pendidikan*, 7(3), 174–185.

Fitriah, L., & Mulyadi, D. (2020). Implementasi undang-undang sistem pendidikan nasional dalam pembentukan karakter peserta didik di sekolah dasar. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 8(2), 112–124.

Kusnandar, W., & Handayani, T. (2024). Analisis kesiapan sekolah dalam menghadapi akreditasi paradigma baru: Studi kasus pada sekolah dasar rural. *Jurnal Inovasi Pengelolaan Pendidikan*, 6(1), 32–46.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. Revisi). Remaja Rosdakarya.

Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif (Teori dan aplikasi praktis)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta.

Roosinda, F. W., Lestari, A. F., Aminin, A., & Anisah, N. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Media Sains Indonesia.

Rukin, R. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. 2). Jakad Media Publishing.

Saputra, A., & Lestari, P. (2022). Eksplorasi nilai sejarah dan filosofi pendidikan sebagai landasan pelestarian kebudayaan. *Jurnal Pedagogi Kontemporer*, 3(2), 79–91.

Sarvitri, A., Anne, M., & Supriyanto, A. (2022). Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sebagai pilar keberhasilan pemenuhan standar mutu lembaga pendidikan. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 10(2), 150–163.

Sugiyono, S. (2020). *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat: Eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.